

DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN CENTER POINT OF INDONESIA KOTA MAKASSAR

Ahmad Azhar Mawardi¹, Nurlinah², Suhardiman Syamsu³

Universitas Hasanuddin¹²³
E-mail: bobacha89@gmail.com

ABSTRACT

This study investigates the socio-economic impacts of the Center Point of Indonesia (CPI) development in Makassar City within the paradigm of Sustainable Urban Development. Utilizing a qualitative descriptive design, data were gathered through in-depth interviews with key stakeholders and direct field observations. The findings reveal that the CPI project has stimulated local economic growth through increased investment, tourism expansion, and job creation, particularly in the service and retail sectors. Nonetheless, the project has also triggered significant social and environmental concerns, including disruption of traditional livelihoods, social displacement, and ecological degradation due to coastal reclamation. Anchored in the 5E framework—Environment, Employment, Equity, Engagement, and Energy—this research underscores the need for integrative urban planning that prioritizes inclusive participation, regulatory accountability, and intersectoral coordination. The study contributes to the discourse on sustainable coastal urbanization in developing countries, offering practical insights for policymakers and urban developers

Keywords: Sustainable Urban Development, socio-economic impact, CPI Makassar, coastal reclamation, urban planning, 5E framework

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar dalam kerangka pembangunan kota berkelanjutan. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan dan observasi lapangan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek CPI mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan investasi, perluasan pariwisata, dan penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor jasa dan perdagangan. Namun demikian, proyek ini juga memunculkan tantangan sosial dan lingkungan yang signifikan, termasuk terganggunya mata pencaharian tradisional, dislokasi sosial, serta degradasi ekologis akibat reklamasi pantai. Dengan menggunakan kerangka 5E—Environment, Employment, Equity, Engagement, dan Energy—penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan kota yang integratif dan berkeadilan. Studi ini memberikan kontribusi terhadap wacana urbanisasi pesisir berkelanjutan di negara berkembang, serta menawarkan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaku pembangunan kota.

Kata Kunci: Pembangunan Kota Berkelanjutan, Dampak Sosial Ekonomi, CPI Makassar, Reklamasi Pesisir, Perencanaan Kota, Kerangka 5E

PENDAHULUAN

Proses modernisasi di kota besar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, pada umumnya diikuti oleh urbanisasi, revitalisasi, normalisasi, peremajaan dan pembangunan kawasan. Perkembangan kota-kota di Indonesia dalam tiga setengah decade terakhir telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan segala permasalahannya, pembangunan kota tidak hanya memberikan dampak positif, namun di sisi lain juga memberikan dampak negative, misalnya pencemaran air, polusi udara, banjir, intrusi air laut dan sebagainya. (Arif, 2015). Peningkatan jumlah penduduk daerah perkotaan menimbulkan tekanan cukup besar terhadap sumberdaya dan lingkungan perkotaan (Setyowati, 2008).

Beberapa tahun terakhir ini, isu lingkungan yang terkait dengan perkembangan ekonomi yang pesat semakin menjadi perhatian penting oleh pemerintah pusat dan daerah (Guan dkk., 2011). Terjadi umpan balik di mana degradasi lingkungan akan mempengaruhi pengembangan ekonomi dan sosial dengan adanya batas nyata untuk pertumbuhan dan memburuknya kualitas hidup (Diaz, 2011). Permasalahan yang sering dijumpai di kawasan perkotaan antara lain adanya kawasan kumuh, pencemaran air dan udara, kurangnya sanitasi, urbanisasi, kemacetan, penurunan permukaan tanah dan sebagainya.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Makassar

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Makassar (Jiwa)						
		Laki laki		Perempuan		Jumlah	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Mariso		28816	28903	28610	28691	57426	57594
Mamajang		27514	27520	28535	28536	56049	56056
Tamalate		90393	90757	90431	90776	180824	181533

Rappocini		70779	70802	73808	73817	144587	144619
Makassar		40657	40699	41410	41443	82067	82142
Ujung Pandang		11893	11895	12633	12631	24526	24526
Wajo		14970	15002	15002	15031	29972	30033
Bontoala		27284	27339	27712	27763	54996	55102
Ujung Tanah		17914	17995	17875	17952	35789	35947
Kepulauan Sangkarang		7019	7051	7106	7136	14125	14187
Tallo		73068	73289	71909	72111	144977	145400
Panakkukang		69663	69693	69927	69942	139590	139635
Manggala		73230	73649	73494	73900	146724	147549
Biringkanaya		104472	104997	104576	105079	209048	210076
Tamalanrea		51388	51415	51789	51805	103177	103220
Jumlah		709060	711006	714817	716613	1423877	1427619

Sumber : diolah dari BPS 2020

Perkembangan pembangunan Indonesia saat ini diramaikan dengan adanya berbagai kegiatan dalam memanfaatkan lahan ekosistem pesisir diantaranya dengan melakukan tindakan reklamasi ekosistem pesisir. Kegiatan reklamasi diperuntukkan untuk berbagai tujuan dan keperluan. Diantaranya untuk area pelabuhan, tambak, kawasan bisnis dan hiburan serta lainnya. Kegiatan reklamasi terjadi hampir diseluruh wilayah pesisir Indonesia, terutama kota-kota yang memerlukan area lahan pembangunan yang mendesak diantaranya Jakarta dan Kota Makassar (Sulmiah et al., 2019).

Pembangunan selalu diidentikkan dengan kemajuan, kesejahteraan dan kekayaan, tidak jauh dari motif ekonomi (Melati, 2020). Seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034 bahwa yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota (RTRKSK) adalah Rencana Tata Ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Kota terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Seperti halnya di Kota Makassar tepatnya dikawasan tanjung bunga yang dibagian barat berbatasan dengan pesisir pantai dari laut Makassar. Dalam perkembangannya Tanjung Bunga saat ini adalah menjadi sebuah kawasan bisnis dan kawasan hunian dengan beberapa fasilitas yang mendukung kawasan ini untuk menjadi sebuah kota mandiri. Di kawasan inipun telah dibangun sebuah proyek reklamasi Central poin of Indonesia (CPI) yang banyak mengundang konflik selama pembangunan reklamasi tersebut. Pembangunan kawasan pesisir ini seperti CPI, di bangun jembatan melintang yang menghubungkan dengan pulau Lae-Lae. Pemerintah Kota Makassar sekaligus Pemerintah provinsi Sulawesi selatan ingin menjadikan pesisir pantai Makassar sebagai WaterFront City melalui proyek Central Poin of Indonesia (CPI).

Pembangunan kawasan CPI dengan mereklamasi Pantai tersebut sebagai ruang publik memberikan dampak positif yang besar bagi perkembangan ekonomi sosial dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar. Namun dengan dilakukannya Reklamasi Pantai untuk pembangunan ruang publik juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat seperti berubahnya mata pencaharian dari penduduk sekitar pesisir yaitu sebagai nelayan. Karena berakibat pada berubahnya ekosistem pantai setelah reklamasi, terjadinya banjir rob, serta rusaknya kawasan mangrove.

Pembangunan CPI di Kota Makassar, kiranya perlu mencermati bagaimana potensi atau dampak yang akan terjadi, ketika pembangunan itu berlangsung. Pembanguna tidak boleh hanya berfokus pada masalah tata ruang kota serta analisis dampak lingkungan saja. Aspek kesejahteraan, peran serta seluruh elemen menjadi

suatu komponen yang sangat penting diperhatikan dalam konteks pembangunan kota. Hal itu sangat memungkinkan akan meminimalisir potensi-potensi kerusakan atau bencana ekologis yang terjadi pada lingkungan, serta risiko-risiko yang mungkin dapat dihadapi masyarakat.

Pemerintah memiliki peran penting menghadirkan sebuah tatanan kota yang ramah dan nyaman untuk dihuni. Karena itu, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dalam mewujudkan kota layak huni bagi warganya. Untuk itu diperlukan kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha. Setiap pembangunan infrastruktur, pemerintah kota kiranya dapat selalu meminta pertimbangan dari masyarakat sebelum menjadi sebuah program kerja bersama. Sebab, pada akhirnya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah juga akan digunakan oleh warga masyarakat.

Dalam mewujudkan kota berkelanjutan tentu saja diperlukan beberapa prinsip dasar yang dikenal dengan 5E yaitu *Environment (Ecology)* yang memperhatikan aspek lingkungan, *Economy (Employment)* yang memperhatikan aspek kesejahteraan, *Equity* yang memperhatikan aspek pemerataan, *Engagment* yang memperhatikan aspek peran serta, dan *Energy*. (Research Trianggle Institute, 1996 dalam Budihardjo, 2009)

Dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisa pembangunan CPI Kota Makassar dengan memperhatikan prinsip dasar 5E (*Environment, Employment, Equity, Engagment, dan Energy*, yang bertujuan untuk menganalisa dampak Ekonomi Sosial dalam pembangunan CPI Kota Makassar yang didasarkan pada prinsip dasar *Sustainable Urban Development*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Untuk menganalisis Sustainable Urban Development dalam Pembangunan CPI Kota Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sebuah gambaran mengenai *Sustainable Urban Development* dalam Pembangunan CPI Kota Makassar, maka jenis dari penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Tipe penelitian ini adalah tipe fenomenologi dimaksudkan untuk memberi sebuah gambaran secara jelas mengenai masalah-

masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang di alami informan. Adapun masalah yang diteliti adalah mengenai penerapan *Sustainable Urban Development* dalam Pembangunan CPI Kota Makassar.

Jenis data dalam penelitian yang dilakukan adalah terdiri dari dua jenis, yaitu: Data Primer (diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kunci mengenai pengetahuan mereka terhadap masalah-masalah tentang *Sustainable Urban Development* dalam Pembangunan CPI Kota Makassar) dan Data Sekunder (data olahan yang berasal dari penelusuran dan penelahan dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan dengan pembangunan CPI Kota Makassar). Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dokumen dan arsip berkaitan dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Data yang terkumpul akan dinalisa secara Deskriptif melalui reduksi data, pengelompokkan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini memfokuskan pada kajian terhadap bagaimana dampak Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dalam *Sustaibale Urban Development* CPI di Kota Makassar, upaya dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu: 1) Pilar Ekonomi didukung oleh elemen pertumbuhan, efisiensi dan stabilitas. Pilar Ekonomi dielaborasi sebagai elemen penggunaan sumberdaya alam secara bijaksana, mendorong pemanfaatan ekonomi local, pengembangan nilai tambah ekonomi dan pengutamaan sumber daya local dibanding impor. Pilar Sosial didukung oleh elemen pemberdayaan, peran serta dan kelembagaan. Pilar sosial dielaborasi menurut elemen jaminan kehidupan, pemerataan akses terhadap pelayanan dasar, demokrasi dan partisipasi, interaksi sosial yang positif dan berkembangnya nilai (*human values*) bagi kehidupan yang berkualitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kawasan *Center Point of Indonesia* (CPI)

Kawasan *Center Point of Indonesia* (CPI) di Makassar adalah salah satu proyek pembangunan paling ambisius di Indonesia. Berlokasi di pesisir barat Kota Makassar, kawasan ini dibangun di atas lahan reklamasi seluas lebih dari 150

hektar. CPI direncanakan menjadi ikon baru bagi kota dan berfungsi sebagai pusat bisnis, pariwisata, serta hunian yang modern. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi penghubung penting antara Indonesia Timur dan kawasan lainnya di Indonesia serta internasional. Pembangunan Center point of Indonesia (CPI) merupakan Kawasan terpadu yang juga merupakan hasil reklamasi pantai.

Di Kota Makassar sementara melaksanakan pembangunan atau reklamasi kawasan pesisir pantai untuk sebuah Kawasan bisnis terpadu yang disebut Center Point of Indonesia (CPI). Saat ini proses pembangunan CPI sudah mencapai timbunan lebih dari 80% yaitu mencapai 35,5 juta kubik. Adapun gambar pembangunam CPI sebagai berikut :



Gambar 1. Proyeksi Pembangunan CPI

CPI didesain dengan konsep kawasan terpadu yang menggabungkan berbagai fungsi, seperti komersial, perumahan, dan rekreasi. Di dalamnya, terdapat gedung-gedung pencakar langit yang akan menjadi pusat perkantoran, hotel berbintang yang menargetkan wisatawan dan pebisnis, serta pusat perbelanjaan yang menyediakan berbagai produk lokal dan internasional. Selain itu, CPI juga memiliki area hunian elit yang menawarkan kenyamanan dan kemewahan dengan pemandangan langsung ke laut..

Salah satu daya tarik utama dari kawasan CPI adalah fasilitas rekreasinya. Terdapat pantai buatan yang dirancang untuk menjadi destinasi wisata utama, lengkap dengan fasilitas olahraga air dan pelabuhan marina. Ruang terbuka hijau juga menjadi bagian integral dari desain kawasan ini, dengan taman-taman yang

luas yang menyediakan tempat bagi warga dan wisatawan untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam.

Dampak Ekonomi dalam Pembangunan CPI Kota Makassar

1. Peningkatan Aktivitas Ekonomi dan Sturuktur Ekonomi Lokal

Pembangunan CPI menciptakan peluang investasi yang cukup besar, baik dari sektor properti, pariwisata, maupun jasa. Pusat perbelanjaan, hotel, dan fasilitas rekreasi dirancang untuk menarik wisatawan dan pebisnis, meningkatkan perputaran ekonomi lokal. Khususnya dalam pembangunan CPI di Kota Makassar menjadi salah satu objek wisata yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Hadirnya pembangunan CPI sebagai tempat wisata tentunya sangat mempengaruhi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Terlebih lagi para wisatawan juga memberika dampak positif terhadap perekonomian masyarakat seperti mampu memberikan keuntungan ekonomi secara langsung kepada hotel dan restoran, karena perlu kamar yang besar dan makanan yang banyak untuk berbelanja dan menikmati fasilitas wisata. Tidak hanya itu, kehadiran CPI ini juga mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat yang giat dalam aktivitas sebagai *travel agent*, sehingga secara tidak langsung mengurangi pengangguran karena mengantar para wisatawan ke CPI untuk berwisata. Kemudian, memberikan keuntungan kepada pengrajin dan penjual sovenir, karena tourist jenis ini biasanya akan membeli kenang-kenangan untuk dirinya dan kerabatnya (Wirawan & Semara, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembangunan kawasan CPI memicu pertumbuhan perekonomian baik bagi masyarakat maupun pemerintah kota Makassar hingga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh adanya perputaran ekonomi yaitu adanya penyewaan tempat berjualan, tentunya ini bisa membantu masyarakat dalam berwirausaha. Selain itu, masyarakat juga bebas untuk berjualan seperti makanan khas Makassar, souvenir, transportasi, hingga pada wahana dan penyewaan hotel yang ada disekitar kawasan CPI. Aktivitas tersebutlah yang membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

2. Peluang Kerja dan Kualitas Pekerjaan

Sektor pariwisata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, terutama di daerah yang memiliki potensi pariwisata yang tinggi. Sektor pariwisata berkontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan baru, yang pada gilirannya meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal. Penyerapan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, dan jumlah hotel (Saputra & Muchtolifah, 2023). Salah satu dampak utama pengembangan pariwisata adalah peningkatan perekonomian masyarakat lokal. Seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata, pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan infrastruktur seperti jalan, fasilitas umum, dan layanan publik lainnya. Ini tidak hanya mendukung pariwisata, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Oktaviani & Yuliani, 2023). Adanya konstruksi jangka panjang serta pengoperasian fasilitas di CPI menyebabkan terciptanya lapangan kerja di berbagai sektor seperti konstruksi, perhotelan, jasa keamanan, dan retail. Hal ini berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembangunan sektor wisata dalam hal ini kawasan CPI menunjukkan bahwa kehadiran pariwisata di tengah Kota Makassar membuka peluang kerja bagi masyarakat seperti menjadi petugas pengelolaan kawasan CPI mulai dari sektor pembangunan, pengawas proyek pembangunan, petugas keamanan, hingga pada petugas kebersihan. Masyarakat yang menjadi tenaga kerja juga mendapatkan upah gaji menengah sesuai dengan UMP dan mendapatkan jaminan kesehatan seperti BPJS. Jadi, secara kapabilitas atau kemampuan secara umum pada pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh masyarakat maka akan dipekerjakan di kawasan CPI.

3. Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian mereka melalui sektor pariwisata. Diantaranya yaitu: 1) Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata; 2) Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Budaya Lokal; 3) Meningkatkan Keterampilan dalam

Bidang Perhotelan dan Jasa Pariwisata; 4) Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya dan Infrastruktur; 5) Program Pelatihan yang Berkelanjutan (Iskandar et al., 2025). Peningkatan standar kualitas ini akan langsung berdampak pada kepuasan wisatawan dan pada peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata (Awandari & Indrajaya, 2016).

Berdasarkan teori dan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka dapat dilakukan dengan cara melakukan pelatihan dan pembinaan. Adapun pengembangan keterampilan yang bisa dilakukan adalah pemanfaatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata, pelatihan kewirausahaan berbasis budaya lokal, meningkatkan keterampilan dalam bidang perhotelan dan jasa pariwisata termasuk transportasi, peningkatan akses sumber daya dan infrastruktur, dan program pelatihan yang berkelanjutan.

Dampak Sosial dalam Pembangunan CPI Kota Makassar

1. Akses Terhadap Sumber Daya

Sektor-sektor unggulan yang berkembang di kawasan ini antara lain sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor jasa keuangan, sektor konstruksi, dan sektor pariwisata. Keberadaan sektor-sektor ini memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, serta perbaikan infrastruktur yang memperlancar distribusi barang dan jasa (Efendi et al., 2022). Dengan demikian, pariwisata bukan hanya memperbaiki perekonomian tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya yang lebih baik, asalkan didukung oleh kebijakan yang tepat dan pengelolaan yang efisien di tingkat daerah (Wahyuni et al., 2024). Tugas dan kewenangannya yakni Peraturan dapat menetapkan tugas dan kewenangan RT/RW secara lebih spesifik, seperti tugas dalam bidang keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, pembangunan, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat (Peraturan Walikota Makassar, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa akses fasilitas yang ada di kawasan CPI sangat mudah dan terbuka untuk siapa saja. Termasuk fasilitas bagi pengelola, pemilik perumahan yang ada didalam kawasan, hingga para

pengunjung. Kemudahan mengakses seperti listrik, air, dan fasilitas umum lainnya seperti jalan raya. Selain itu, masyarakat juga berkesempatan untuk bisa memanfaatkan arena kawasan untuk berjualan dengan syarat pemanfaatan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dari hasil wawancara juga dapat diketahui bahwa dalam pembangunan dan pengelolaan juga telah diatur dalam peraturan gubernur yang mengatur tentang peran serta RT/RW. Tugas dan kewenangannya yakni Peraturan dapat menetapkan tugas dan kewenangan RT/RW secara lebih spesifik, seperti tugas dalam bidang keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, pembangunan, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat

2. Ketimpangan Sosial dan Pemerataan

Pemerataan ekonomi merupakan salah satu strategi yang penting dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi yang ada dalam masyarakat. Ketimpangan sosial-ekonomi, yang tercermin dalam disparitas besar dalam distribusi pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar, memiliki dampak yang signifikan pada stabilitas sosial dan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi sering kali berhubungan dengan masalah sosial seperti kriminalitas, ketidakpuasan politik, dan ketidakstabilan sosial, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerataan ekonomi berfokus pada distribusi yang lebih adil dari sumber daya dan kesempatan (Hababil et al., 2024).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ketimpangan sosial dan pemerataan atau keadilan yang dirasakan oleh masyarakat akibat pembangunan kawasan CPI. Sebenarnya, pembangunan ini menuai pro kontra, akan tetapi tujuan dilakukannya pembangunan dan reklamasi itu karena untuk meminimalisir terjadinya abrasi pantai. Hal tersebut menjadi langkah preventif untuk menjaga ekosistem sepanjang anjungan pantai losai. Satu hal yang menjadi harapan adanya kawasan CPI ialah masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang ada baik untuk berwirausaha maupun sebagai pengunjung. Kawasan CPI terbuka untuk siapa saja, walaupun akses kepemilikan terbatas.

3. Keterampilan Masyarakat

Keberhasilan pengembangan pariwisata dapat dilihat dari keterlibatan aktif masyarakat setempat dalam pengelolaan pariwisata. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang dibentuk oleh masyarakat lokal berperan penting dalam merencanakan dan mengelola kawasan wisata. Mereka menyadari potensi yang ada dan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan pantai sebagai destinasi wisata. Hal ini tidak hanya meningkatkan perekonomian tetapi juga memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengelolaan pariwisata (Makwa, 2019).

Pengembangan pariwisata misalnya mengambil contoh di Desa Wisata Sasak Ende telah melibatkan masyarakat setempat dalam berbagai aspek, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan sektor pariwisata. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata menjadi sangat penting untuk menciptakan manfaat yang berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul. Pengelolaan desa wisata di Sasak Ende dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat lokal, yang menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi dalam proses pembangunan dan pengelolaan destinasi wisata. Masyarakat Sasak Ende aktif mengelola berbagai atraksi wisata yang berbasis pada budaya lokal, seperti kerajinan tangan (tenun, gelang) dan kesenian tradisional (Surahman et al., 2020). Konsep seperti inilah yang diharapkan juga dapat menghiasi pembangun CPI di Kota Makassar.

Ada 3 (tiga) pendekatan yang diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kota dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah dan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui peningkatan kolaborasi, desentralisasi, dan inovasi teknologi (Ramdani & Habibi, 2017). Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan CPI menjadi salah satu isu utama. Sebagian warga merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai atau kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya sebelum proyek dilaksanakan. Pembangunan CPI sebagai sektor pariwisata seharusnya memberikan dan membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan CPI.

Pembangunan CPI menunjukkan kemajuan dari sisi infrastruktur dan investasi kota, namun aspek sosial dan ekologis belum mendapatkan perhatian

proporsional. Pembangunan kota berkelanjutan menuntut keselarasan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam konteks CPI, ketidakseimbangan ini justru memunculkan risiko sosial jangka panjang. Ke depan, sangat penting agar pemerintah Kota Makassar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek serupa. Rekomendasi pengembangan kawasan CPI untuk lebih maju antara lain:

- 1) Meningkatkan keterlibatan publik sejak tahap perencanaan.
- 2) Menyediakan program kompensasi dan pelatihan kerja bagi masyarakat terdampak.
- 3) Menyusun regulasi perlindungan lingkungan yang ketat untuk reklamasi.
- 4) Memastikan transparansi tata kelola proyek melalui audit sosial dan lingkungan

KESIMPULAN

Secara ekonomi, pembangunan CPI di Kota Makassar berhasil menciptakan peluang investasi besar, khususnya dalam sektor properti, pariwisata, dan jasa. Pusat perbelanjaan, hotel, serta fasilitas rekreasi yang dibangun dalam kawasan ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal, meningkatkan perputaran uang, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kehadiran sektor pariwisata dalam CPI tidak hanya memperkenalkan Makassar sebagai destinasi wisata tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat, termasuk penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan pelaku usaha kecil seperti pedagang souvenir dan agen perjalanan. Namun, pembangunan ini juga membawa dampak sosial yang perlu mendapat perhatian serius. Beberapa dampak sosial negatif yang teridentifikasi adalah peningkatan biaya hidup bagi masyarakat sekitar dan hilangnya akses terhadap beberapa sumber daya alam yang sebelumnya digunakan secara bebas. Selain itu, meskipun ada manfaat ekonomi yang dirasakan, ketidakseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan sosial menunjukkan pentingnya peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan proyek ini. Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yang tercermin dalam konsep 5E (*Environment, Employment, Equity, Engagement, and Energy*) harus dijadikan

acuan dalam melanjutkan pengembangan kawasan CPI untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

REFERENSI

- Arif, Zulkifli. (2015). *Pengelolaan Kota Berkelanjutan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Awandari, L. P. P., & Indrajaya, I. G. B. (2016). Pengaruh Infrastruktur, Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(12), 1435–1462.
- Efendi, A., Agussalim, A., & Suhab, S. (2022). Analisis Sektor Unggulan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Pada Kawasan Perkotaan Mamminasata. *Development Policy And Management Review (Dpmr)*, 2(2), 100–118.
- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi Dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-Ekonomi Antar Masyarakat. *Journal Of Macroeconomics And Social Development*, 1(4), 1–9.
- Iskandar, M. I., Hasibuan, B., & Nahas, A. (2025). Dampak Pembangunan Pariwisata Terhadap Ekonomi Dan Budaya Lokal: Tantangan Dan Solusi Untuk Pengelolaan Berkelanjutan. *Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5778–5782.
- Makwa, H. (2019). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal Di Desa Tanjung Luar Lombok Timur. *Jurnal Humanitas*, 5(2), 108–125.
- Oktaviani, A. B., & Yuliani, E. (2023). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Kajian Ruang*, 3(1), 1–17.
- Peraturan Walikota Makassar, Pub. L. No. Nomor 27 Tahun 2022, 2022 (2022). [https://Mamajangkec.Makassarkota.Go.Id/Storage/Postingan/Dokumen/Dokumen-1647166486-Walikota Makassar.Pdf#:~:Text=\(1\) Peran Serta Rt Dan Rw Dilakukan,Fungsi-Fungsi Pemerintahan Dan Pelayanan Kepada Warga Masyarakat](https://Mamajangkec.Makassarkota.Go.Id/Storage/Postingan/Dokumen/Dokumen-1647166486-Walikota%20Makassar.Pdf#:~:Text=(1)%20Peran%20Serta%20Rt%20Dan%20Rw%20Dilakukan,Fungsi-Fungsi%20Pemerintahan%20Dan%20Pelayanan%20Kepada%20Warga%20Masyarakat.).

- Ramdani, D. F., & Habibi, F. (2017). Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Program Smart City Di Kota Bandung. *Prosiding Seminar Nasional Riset Terapan | Senasset*, 0(0), 125–129. [Http://E-Jurnal.Lppmunsera.Org/Index.Php/Senasset/Article/View/436/462](http://E-Jurnal.Lppmunsera.Org/Index.Php/Senasset/Article/View/436/462)
- Saputra, Y. E., & Muchtolifah. (2023). Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Batu. *Jemsi (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(5), 2021–2028.
- Surahman, T., Sudiarta, I. N., & Suwena, I. K. (2020). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Ekonomi Dan Sosial Budaya Masyarakat Lokal Desa Wisata Sasak Ende, Lombok. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 20(1), 38–48. 9817
- Wahyuni, E. S., Nursini, & Sabir. (2024). Analisis Determinan Ekonomi Dan Sosial Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Makassar. *Development Policy And Management Review (Dpmr)*, 4(2), 164–183.
- Wirawan, P. E., & Semara, I. M. T. (2021). *Pengantar Pariwisata*. Ipb Internasional Press.